

**ANALISIS RASIO KEUANGAN DAERAH UNTUK MENILAI
KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN EKS-KARESIDENAN BANYUMAS
TAHUN 2013-2017**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I
pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis**

**Disusun Oleh :
EGUH SAEMESTI
B200150165**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2019**

HALAMAN PERSETUJUAN

**ANALISIS RASIO KEUANGAN DAERAH DALAM MENILAI KINEJA
KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN EKS
KARESIDENAN BANYUMAS TAHUN 2013-2017**

PUBLIKASI ILMIAH

OLEH:

EGUH SAEMESTI

B200150165

Telah diperiksa dan disetujui oleh:

Dosen Pembimbing



Eny Kusumawati, SE., M.M, Ak, CA

NIDN. 0623037101

HALAMAN PENGESAHAN

ANALISIS RASIO KEUANGAN DAERAH DALAM MENILAI KINERA
KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN EKS
KARESIDENAN BANYUMAS TAHUN 2013-2017

Yang ditulis oleh:

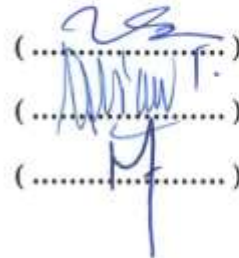
EGUH SAEMESTI

B200150165

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada hari Selasa, 12 November 2019
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji:

1. Eny Kusumawati, S.E., M.M, Ak, CA (.....)
2. Dr. Erma Setiawati, Akt, M.M (.....)
3. Dra. Rina Trisnawati, M.Si., Akt., Ph.D. (.....)



Mengetahui:

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Surakarta



Dr. Samsudin, M.M
NIDN. 0017025701

NIDN. 0017025701

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam publikasi ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya diatas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 13 November 2019

Penulis



EGUH SAEMESTI

B200150165

ANALISIS RASIO KEUANGAN DAERAH UNTUK MENILAI KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN EKS- KARESIDENAN BANYUMAS TAHUN 2013-2017

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja keuangan Pemerintah Daerah berdasarkan analisis rasio keuangan daerah. Desain penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah Kabupaten/Kota Eks Karesidenan Banyumas. Metode sampling menggunakan sampling jenuh dengan meneliti semua Laporan Keuangan berupa Laporan APBD dan Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2013-2017 Kabupaten/Kota Eks Karesidenan Banyumas, terdiri 4 kabupaten. Sampel dalam penelitian ini adalah laporan keuangan berupa Laporan APBD dan Laporan Realisasi Anggaran tahun 2013-2017. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *time series*, *cross sectional*, *commonsize*, *indeks* dan deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan selama periode 2013-2017 tingkat kemandirian daerah Kabupaten/Kota Eks Karesidenan Banyumas adalah rendah sekali. Tingkat efektivitas rata-rata efektif, tingkat keserasian rata-rata lebih besar digunakan untuk belanja operasi. Tingkat pertumbuhan PAD, pendapatan, belanja operasi, belanja modal mengalami rata-rata pertumbuhan yang positif.

Kata kunci: rasio keuangan, kinerja keuangan, pemerintah daerah

Abstract

This study aims to determine the financial performance of local governments based on the analysis of regional financial ratios. The design of this research is descriptive quantitative research. The population in this study is the Regency / City of the Ex Residence of Banyumas. The sampling method uses saturated sampling by examining all Financial Statements in the form of the APBD Report and the 2013-2017 Budget Realization Report of the Regency / City of the Ex-Residency of Banyumas, consisting of 4 districts. The sample in this study is the financial statements in the form of APBD Report and Anggran Realization Report for 2013-2017. The analytical methods used in this study are time series, cross sectional, commonsize, index and quantitative descriptive. The results showed that during the period of 2013-2017 the level of independence of the Banyumas Regency / City District was very low. The level of effectiveness of the average effective, the greater average level of harmony is used for operating expenditure. The growth rate of PAD, income, operating expenditure, capital expenditure experienced a positive average growth.

Keywords : financial ratio, financial performance, local governments

1. PENDAHULUAN

Saat ini perkembangan akuntansi sektor publik di Indonesia semakin pesat. Perkembangan tersebut didasari oleh adanya era baru dalam pelaksanaan

pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan ini mempunyai peran untuk menentukan nasib pemerintah daerah karena daerah tersebut akan menjadi daerah yang kuat dan mampu berkembang apabila daerah tersebut mampu mengelola keuangannya secara baik. Pengelolaan keuangan daerah yang baik akan membuat keutuhan aset daerah terjaga.

Dalam suatu otonomi daerah dapat dikatakan berhasil apabila hal tersebut tidak lepas dari kinerja Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangan secara mandiri, sesuai dengan yang diharapkan, dan tidak melanggar peraturan perundang-undang yang berlaku. Pengelolaan tersebut dilakukan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahunnya ditetapkan dengan peraturan daerah (PP 58 Tahun 2005, pasal 4)

Untuk mencapai suatu pemerintahan dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tentunya pemerintah tersebut harus meningkatkan strategi dan kebijakan yang berfokus pada sektor-sektor strategis dan potensial. Selain itu, perlu juga melakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil-hasil pembangunan. Hal tersebut dilakukan secara berkala melalui sajian data statistik yang berkualitas.

Salah satu yang menggambarkan kinerja pemerintah daerah adalah melalui laporan keuangannya. Pemerintahan dengan laporan keuangan yang baik akan menyajikan laporan keuangannya secara transparan dan tentunya tidak terdapat keganjilan dalam penyajiannya. Laporan keuangan dengan predikat baik adalah yang mempunyai opini wajar tanpa pengecualian.

Terkait dengan pengelolaan keuangan daerah, pemerintah dengan persetujuan DPR-RI telah menetapkan satu paket undang-undang di bidang keuangan negara : UU No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Negara, UU No. 63 Tahun 2019 tentang Perbendaharaan, UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Ketiga Perangkat diatas menjadi dasar bagi institusi negara untuk mengubah pola administrasi keuangan menjadi pengelolaan keuangan. Kinerja keuangan daerah atau kemampuan daerah menjadi salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah. Bentuk dari penilaian kinerja tersebut berupa rasio keuangan yang terbentuk dari

unsur laporan pertanggung jawaban kepala daerah berupa perhitungan APBD (Halim, 2012: 212).

Kinerja Keuangan Daerah merupakan salah satu ukuran yang digunakan untuk melihat kemampuan suatu daerah. Bentuk penilainnya berupa analisis rasio keuangan yang terbentuk dari unsur laporan pertanggungjawaban Kepala Daerah berupa laporan APBD (Halim, 2012: 212). Pengukuran kinerja keuangan dirasa sangat penting karena untuk menilai akuntabilitas pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah. Mengingat bahwa akuntabilitas bukan sekedar kemampuan untuk menunjukkan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan secara efektif, efisien dan ekonomis (Mardiasmo, 2013: 182)

Salah satu cara untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah yaitu dengan cara analisis rasio keuangan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang telah ditetapkan dan dilaksanakan. rasio yang digunakan antara lain yaitu Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas, Rasio Keserasian, dan Rasio Pertumbuhan (Halim, 2012: 230)

Menurut Halim (2012: 221-234), bahwa rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal. Semakin tinggi rasio kemandirian maka ketergantungannya semakin rendah. Ketergantungan tersebut kepada pemerintah pusat maupun pemerintah Provinsi. Untuk rasio keserasian menggambarkan bagaimana pemerintah daerah dalam memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunannya secara optimal.

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah menggambarkan suatu ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat atau sumber dana eksternal. Dengan catatan, semakin tinggi rasio kemandirian keuangan daerah semakin rendah tingkat ketergantungannya pada sumber dana eksternal atau dana dari pemerintah pusat (Halim, 2012: 221-234).

Rasio Efektifitas dilakukan untuk menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan yang telah direncanakan sebelumnya. Dan setelah itu dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan berdasarkan potensi yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Dan untuk rasio efisiensi dilakukan untuk menggambarkan tingkat kemampuan pemerintah daerah

dalam mengefisiensi biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah (Mardiasmo, 2013: 112).

Kemudian untuk Rasio Keserasian yaitu rasio yang menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dana yang dimiliki untuk belanja rutin dan belanja pembangunan dengan optimal (Halim, 2012: 221-234). Sedangkan untuk Rasio Pertumbuhan yaitu rasio yang menggambarkan apakah pemerintah daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan atau selama beberapa periode, kinerjanya mengalami pertumbuhan apa tidak (Mahmudi, 2010: 138)

Penelitian tentang Kinerja Keuangan ini mengacu pada penelitian yang dilakukan Masita Machmud, George Kawung, dan Wensy Rompas dengan judul Analisis Kinerja Keuangan Daerah Di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2007-2012. Dimana perbedaannya, terdapat penambahan rasio keuangan dan terdapat teknik yang membandingkan rasio keuangannya dengan Kabupaten/Kota yang lain yang masih dalam satu karisidenan dan mengambil populasi dan periode tahun yang berbeda yaitu di Kabupaten Eks-Karisidenan Banyumas tahun 2013-2017

2. METODE

Desain penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif yang mempunyai tujuan untuk mengetahui kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Eks-Karisidenan Banyumas tahun 2013-2017 apabila ditinjau dari analisis rasio keuangannya, perkembangan kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Eks-Karisidenan Banyumas tahun 2013-2017 dilihat dari analisis cross-section, time-series, common size, dan indeks. Data yang digunakan adalah data sekunder yaitu dengan melihat laporan keuangan berupa APBD dan laporan Realisasi Anggaran dari pemerintah Kabupaten Eks-Karisidenan Banyumas tahun 2013-2017. Populasi dalam penelitian ini adalah Pemerintah Kabupaten/Kota Eks-Karisidenan Banyumas. Didalam penelitian ini menggunakan teknik/metode sampling jenuh dengan meneliti semua Laporan APBD dan Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Eks-Karisidenan Banyumas tahun 2013-2017.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, dimana data yang akan dihitung berupa data APBD dan Laporan Realisasi Anggaran

Kabupaten/Kota Eks-Karesidenan Banyumas. Untuk data tahun 2013 sampai 2014 menggunakan pendekatan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang mana berbasis cash toward acrual. Untuk data tahun 2015 sampai 2017 menggunakan pendekatan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akunaatsi Pemerintahan yangmana berbasis akrual yang datanya menggunakan Laporan APBD dan Realisasi Anggaran yang diperoleh dari situs www.djpk.kemenkeu.go.id dengan mengunduh data terhadap masing-masing laporan keuangan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

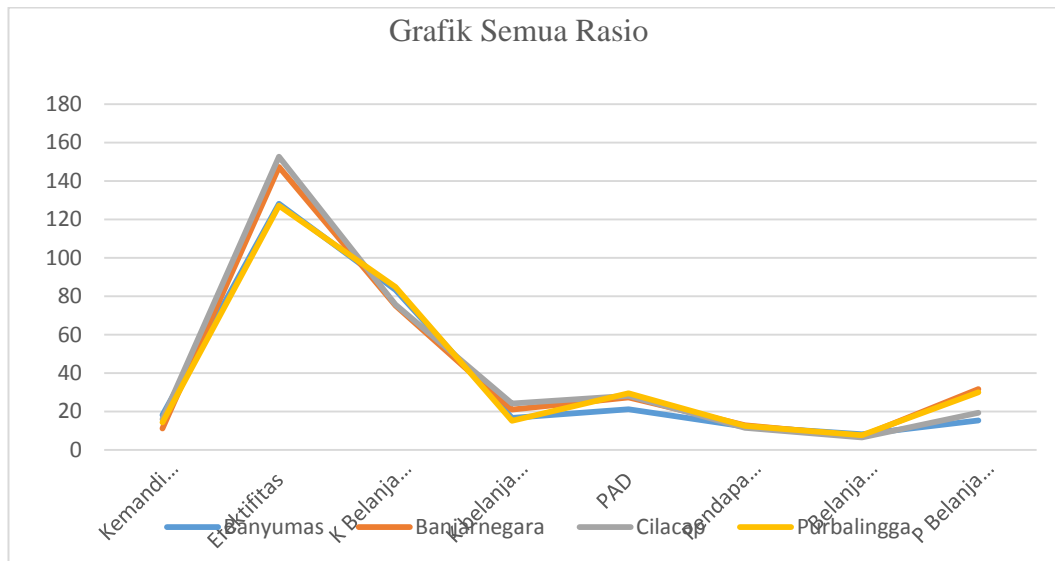
a. Analisis Rata-Rata Untuk Semua Rasio

Analisis secara *cross section* terhadap semua rasio keuangan daerah Kabupaten Eks Karesidenan Banyumas selama tahun 2013-2017 untuk rata-rata rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten/Kota Eks Karesidenan Banyumas selama tahun 2013-2017 paling besar yaitu Kabupaten Banyumas sebesar 18,228% termasuk kriteria sedang. Sedangkan untuk rata-rata rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten/Kota Eks Karesidenan Banyumas tahun 2013-2017 paling kecil yaitu Kabupaten Banjarnegara sebesar 11,135% termasuk kriteria sedang. Hal ini di karenakan Kabupaten Banyumas memiliki Pendapatan Transfer dan Pendapatan Daerah lebih besar daripada Banjarnegara

Tabel 1. Analisis Rata-Rata Semua Rasio

Keterangan	Rata-rata Tahun 2013-2017 (%)			
	Banyumas	Banjarnegara	Cilacap	Purbalingga
Rasio Kemandirian	18,228	11,135	16,060	14,345
Rasio Efektifitas	128,203	147,286	152,742	127,165
Rasio Keserasian (Belanja Operasi)	83,311	75,160	75,601	84,837
Rasio Keserasian (Belanja Modal)	16,668	20,944	24,238	15,161
Rasio Pertumbuhan PAD	21,235	27,403	28,148	29,569
Rasio Pertumbuhan Pendapatan	12,180	12,817	11,468	12,544
Rasio Pertumbuhan Belanja Operasi	8,121	7,157	6,450	7,724
Rasio Pertumbuhan Belanja Modal	15,349	31,654	19,417	29,944

Sumber Data: Hasil Analisis



Analisis untuk rata-rata keseluruhan rasio keuangan Kabupaten Eks Karesidenan Banyumas selama tahun 2013-2017. Untuk rata-rata rasio efektivitas yang paling besar yaitu Kabupaten Cilacap sebesar 152,742%. Sedangkan rata-rata rasio efektivitas Kabupaten/Kota Eks Karesidenan Banyumas tahun 2013-2017 paling kecil yaitu Kabupaten Purbalingga sebesar 127,165%. Hal ini dikarenakan Kabupaten Cilacap memiliki realisasi PAD lebih besar daripada Kabupaten Purbalingga, sehingga tingkat efektivitas menunjukkan sangat efektif.

Analisis terhadap keseluruhan rasio Kabupaten Eks Karesidenan Banyumas selama tahun 2013-2017 untuk rata-rata rasio belanja operasi Kabupaten Eks Karesidenan Banyumas selama tahun 2013-2017 paling besar yaitu Kabupaten Purbalingga sebesar 84,837% serta paling kecil yaitu Kabupaten Banjarnegara sebesar 75,160%. Hal ini di karenakan Kabupaten Purbalingga memiliki belanja operasi lebih besar daripada Kabupaten Banjarnegara. Sedangkan untuk rata-rata rasio belanja modal Kabupaten Eks Karesidenan Banyumas tahun 2013-2017 paling besar yaitu Kabupaten Cilacap sebesar 24,238% serta paling kecil yaitu Kabupaten Purbalingga sebesar 15,161%. Hal ini di karenakan Kabupaten Cilacap memiliki belanja modal lebih besar daripada Kabupaten Purbalingga. Melalui rasio keserasian dapat diketahui seberapa besar proporsi dana yang di alokasikan oleh Pemerintah Daerah yang digunakan untuk

belanja operasi dan belanja modal dalam melaksanakan kegiatan atau program Pemerintahan.

Analisis terhadap keseluruhan rasio Kabupaten Eks Karesidenan Banyumas selama tahun 2013-2017 untuk rata-rata rasio pertumbuhan PAD Kabupaten Eks Karesidenan Banyumas selama tahun 2013-2017 paling besar yaitu Kabupaten Purbalingga sebesar 29,569%. Sedangkan untuk rata-rata rasio pertumbuhan PAD Kabupaten Eks Karesidenan Banyumas selama tahun 2013-2017 paling kecil yaitu Kabupaten Banyumas sebesar 21,235%, hal ini di karenakan Kabupaten Purbalingga memiliki Retribusi Daerah pada Pendapatan Asli Daerah lebih besar daripada Kabupaten Banyumas.

Analisis terhadap keseluruhan rasio Kabupaten/Kota Eks Karesidenan Banyumas selama tahun 2013-2017. Untuk rata-rata rasio pertumbuhan pendapatan Kabupaten Eks Karesidenan Banyumas selama tahun 2013-2017 paling besar yaitu Kabupaten Banjarnegara sebesar 12,817%. Sedangkan untuk rata-rata rasio pertumbuhan pendapatan Kabupaten/Kota Eks Karesidenan Banyumas selama tahun 2013-2017 paling kecil yaitu Kabupaten Cilacap sebesar 11,468%, hal ini di karenakan Kabupaten Banjarnegara memiliki selisih pendapatan per tahun yang lebih besar daripada Kabupaten Cilacap.

Analisis terhadap keseluruhan rasio Kabupaten Eks Karesidenan Banyumas selama tahun 2013-2017. Untuk rata-rata rasio pertumbuhan belanja operasi Kabupaten/Kota Eks Karesidenan Banyumas selama tahun 2013-2017 paling besar yaitu Kabupaten Banyumas sebesar 8,121%. Sedangkan untuk rata-rata rasio pertumbuhan belanja operasi Kabupaten/Kota Eks Karesidenan Banyumas selama tahun 2013-2017 paling kecil yaitu Kabupaten Cilacap sebesar 6,450%, hal ini di karenakan Kabupaten Banyumas memiliki selisih belanja operasi per tahun yang lebih besar daripada Kabupaten Cilacap.

Analisis terhadap keseluruhan rasio Kabupaten Eks Karesidenan Banyumas selama tahun 2013-2017 Untuk rata-rata rasio pertumbuhan belanja modal paling besar yaitu Kabupaten Banjarnegara sebesar 31,654%. Sedangkan untuk rata-rata rasio pertumbuhan belanja modal yang paling kecil yaitu Kabupaten Banyumas sebesar 15,349%, hal ini dikarenakan Kabupaten

Banjarnegara memiliki selisih belanja modal per tahun yang lebih besar daripada Kabupaten Banyumas.

b. Kesimpulan Analisis Commonsize Kabupaten Eks-Karesidenan Banyumas

Tabel 2. Perhitungan Kesimpulan Analisis Commonsize

URAIAN	Kabupaten			
	Banyumas	Banjarnegara	Cilacap	Purbalingga
PENDAPATAN DAERAH	100,000	100,000	100,000	100,000
Pendapatan Asli Daerah	18,228	11,135	16,060	14,345
Pajak Daerah	5,296	2,057	4,975	2,518
Retribusi Daerah	1,289	1,696	1,270	2,311
Hasil PglIn Kky yg Dipisahkan	0,489	0,699	0,610	0,852
Lain-lain PAD yang Sah	11,154	6,682	9,205	8,665
Dana Perimbangan	59,590	67,752	62,995	64,542
Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	2,114	2,311	2,729	1,965
Dana Alokasi Umum	49,645	55,665	50,713	44,237
Dana Alokasi Khusus	7,831	7,847	9,553	5,672
Lain-lain Pendapatan yang sah	22,182	21,113	20,945	21,113
Hibah	1,241	0,051	0,177	0,465
Dana Bagi Hasil Pajak	5,316	5,338	5,222	5,491
Dana Penyesuaian dan Oto Khs	12,973	13,089	9,017	12,000
bantuan keuangan		4,014	1,812	0,925
Lain-lain	2,652	5,249	4,753	2,233
BELANJA	98,889	101,702	99,479	97,895
Belanja Operasi	73,454	69,438	66,630	74,515
Belanja Pegawai	50,077	49,783	48,006	51,818
Belanja Barang dan Jasa	21,182	14,696	17,248	20,259
Belanja Hibah	1,873	3,697	2,654	1,827
Belanja Bantuan Sosial	0,322	0,795	0,267	0,860
Belanja Modal	14,655	20,091	21,999	13,254
Belanja Tidak Terduga	0,018	0,033	0,143	0,002
Transfer	10,761	12,141	9,153	9,845
Belanja Bagi Hasil	0,849	3,170	0,230	0,199
Belanja Bantuan Keuangan	9,913	8,971	8,923	9,646
Surplus/Defisit	1,111	-1,702	-8,632	-6,868
Penerimaan	14,834	14,706	14,511	10,916

Sumber: Hasil Analisis

Analisis untuk rata-rata pada rasio pendapatan asli daerah terlihat nilai terendah berada di Kabupaten Banjarnegara sebesar 11,135% yang artinya apabila pendapatan daerah 100% maka rata-rata PAD nya 11,135%. Kondisi ini dikarenakan rasio PAD jumlahnya paling kecil terutama pada pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan dan lain-lain PAD yang sah. Sedangkan nilai tertinggi berada di Kabupaten Banyumas sebesar 18,228% yang artinya apabila pendapatan daerah 100% maka rata-rata PAD nya 18,228% kondisi ini dikarenakan rasio PAD jumlahnya paling besar terutama pada pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain PAD yang sah

Analisis untuk rata-rata commonsize Kabupaten Eks Karesidenan Banyumas tahun 2013-2017 pada rasio dana perimbangan terlihat nilai terendah berada di Kabupaten Banyumas sebesar 59,590% yang artinya apabila pendapatan daerah 100% maka rata-rata dana perimbangannya 59,590% kondisi ini dikarenakan rasio dana perimbangan jumlahnya paling kecil terutama pada dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Sedangkan nilai tertinggi berada di Kabupaten Banjarnegara sebesar 67,752% yang artinya apabila pendapatan daerah 100% maka rata-rata dana perimbangannya 67,752% kondisi ini dikarenakan rasio dana perimbangan jumlahnya paling besar terutama pada dana bagi hasil pajak/ bukan pajak dan dana alokasi umum.

Analisis untuk rata-rata commonsize Kabupaten Eks Karesidenan Banyumas tahun 2013-2017 pada rasio lain-lain PAD yang sah terlihat nilai terendah berada di Kabupaten Cilacap sebesar 20,945% yang artinya apabila pendapatan daerah 100% maka rata-rata lain-lain PAD yang sah nya 20,945% kondisi ini dikarenakan rasio lain-lain PAD yang sah jumlahnya paling kecil terutama pada hibah, dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemda, bantuan keuangan dari provinsi dan pemda dan lain-lain. Sedangkan nilai tertinggi berada di Kabupaten Banyumas sebesar 22,182% yang artinya apabila pendapatan daerah 100% maka rata-rata lain-lain PAD yang sah nya 22,182% kondisi ini dikarenakan rasio lain-lain PAD yang sah jumlahnya paling besar terutama pada hibah, dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemda dan lain-lain.

Analisis untuk rata-rata commonsize Kabupaten Eks Karesidenan Banyumas tahun 2013-2017 pada rasio belanja daerah terlihat nilai terendah berada di Kabupaten Purbalingga sebesar 97,895% yang artinya apabila pendapatan daerah 100% maka rata-rata belanja daerahnya 97,895%. Kondisi ini dikarenakan rasio belanja daerah jumlahnya paling kecil terutama belanja operasi dan belanja modal. Sedangkan nilai tertinggi berada di Kabupaten Banjarnegara sebesar 101,702% yang artinya apabila pendapatan daerah 100% maka rata-rata belanja daerahnya 101,702% kondisi ini dikarenakan rasio belanja daerah jumlahnya paling besar terutama pada belanja operasi dan belanja modal

Analisis untuk rata-rata commonsize Kabupaten Eks Karesidenan Banyumas tahun 2013-2017 pada rasio transfer terlihat nilai terendah berada di Kabupaten Cilacap sebesar 9,153% yang artinya apabila pendapatan daerah 100% maka rata-rata transfernya 9,153% kondisi ini dikarenakan rasio transfer jumlahnya paling kecil terutama pada belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kab/kota/pemdes. Sedangkan nilai tertinggi berada di Kabupaten Banjarnegara sebesar 12,141% yang artinya apabila pendapatan daerah 100% maka rata-rata transfernya 12,141% kondisi ini dikarenakan rasio transfer jumlahnya paling besar terutama pada belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kab/kota/pemdes.

Analisis untuk rata-rata commonsize Kabupaten Eks Karesidenan Banyumas tahun 2013-2017 pada rasio surplus/defisit terlihat nilai terendah berada di Kabupaten Cilacap sebesar -8,632% yang artinya apabila pendapatan daerah 100% maka rata-rata surplus/defisitnya -8,632% kondisi ini dikarenakan pendapatan daerah dikurangi dengan belanja daerah dan transfer hasilnya paling kecil. Sedangkan nilai tertinggi berada di Kabupaten Banjarnegara sebesar 1,111% yang artinya apabila pendapatan daerah 100% maka rata-rata surplus/defisitnya 1,111% kondisi ini dikarenakan pendapatan daerah dikurangi dengan belanja daerah dan transfer hasilnya paling besar.

c. Kesimpulan Analisis Indeks/Trend Kabupaten Eks-Karesidenan Banyumas tahun 2013-2017

Berdasarkan perhitungan pada tabel 3 dibawah, Analisis untuk rata-rata indeks Kabupaten Eks Karesidenan Banyumas tahun 2013-2017 pada rasio dana perimbangan terlihat nilai terendah berada di Kabupaten Cilacap sebesar 97,360% yang artinya apabila dana perimbangan ditahun dasar 100% maka rata-rata dana perimbangannya 97,360% kondisi ini dikarenakan rasio dana perimbangan jumlahnya paling kecil terutama pada dana bagi hasil pajak/bukan pajak dan dana alokasi khusus. Sedangkan nilai tertinggi berada di Kabupaten Banjarnegara sebesar 137,533% yang artinya apabila dana perimbangan ditahun dasar 100% maka rata-rata dana perimbangannya 137,533% kondisi ini dikarenakan rasio dana perimbangan jumlahnya paling besar terutama pada dana bagi hasil pajak/bukan pajak dan dana alokasi umum.

Analisis untuk rata-rata indeks Kabupaten Eks Karesidenan Banyumas tahun 2013-2017 pada rasio lain-lain pendapatan yang sah terlihat nilai terendah berada di Kabupaten Banjarnegara sebesar 116,307% yang artinya apabila lain-lain pendapatan yang sah ditahun dasar 100% maka rata-rata lain-lain pendapatan yang sahnya 116,307% kondisi ini dikarenakan rasio lain-lain pendapatan yang sah jumlahnya paling kecil terutama pada hibah. Sedangkan nilai tertinggi berada di Kabupaten Purbalingga sebesar 150,912% yang artinya apabila lain-lain pendapatan yang sah ditahun dasar 100% maka rata-rata lain-lain pendapatan yang sahnya 150,912% kondisi ini dikarenakan rasio lain-lain pendapatan yang sah jumlahnya paling besar terutama pada hibah.

Tabel 3. Perhitungan Kesimpulan Analisis Indeks Kabupaten Eks-Karesidenan Banyumas

URAIAN	Kabupaten			
	Banyumas	Banjarnegara	Cilacap	Purbalingga
PENDAPATAN DAERAH	135,412	138,718	129,231	139,507
Pendapatan Asli Daerah	170,175	217,415	166,807	208,754
Pajak Daerah	131,824	286,613	117,100	208,387
Retribusi Daerah	89,053	107,258	87,442	128,098
Hasil Pengelolaan Kky yg				
Dipisahkan	124,217	287,634	214,405	130,658
Lain-lain PAD yang Sah	220,471	246,042	234,767	260,836
Dana Perimbangan	127,965	137,533	97,360	126,063
Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	77,326	48,878	85,189	52,026
Dana Alokasi Umum	116,918	87,287	112,099	86,228
Dana Alokasi Khusus	328,065	160,671	279,208	139,514
Lain-lain Pendapatan yang sah	132,683	116,307	123,375	150,912
Hibah	0,000	0,000	0,000	128,951
Dana Bagi Hasil Pajak	151,881	215,498	131,440	205,093
Dana Penyesuaian dan Otonomi				
Khs	105,453	112,857	65,251	125,907
bantuan keuangan		0,000	99,762	30,291
Lain-lain	173,487	0,000	0,000	0,000
BELANJA	135,251	159,106	134,531	145,685
Belanja Operasi	120,031	123,604	117,608	124,110
Belanja Pegawai	110,566	114,929	112,951	126,236
Belanja Barang dan Jasa	163,820	147,509	174,424	115,876
Belanja Hibah	47,459	139,638	52,359	182,722
Belanja Bantuan Sosial	273,739	139,188	242,437	185,149
Belanja Modal	127,210	225,486	147,786	217,794
Belanja Tidak Terduga	156,059	199,194	171,140	22,209
Transfer	533,766	758,555	277,752	378,068
Belanja Bagi Hasil	0,000	5976,318	212,306	334,289
Belanja Bantuan Keuangan	495,578	553,205	270,797	369,772

Sumber Data: Hasil Analisis

Analisis untuk rata-rata indeks Kabupaten Eks Karesidenan Banyumas tahun 2013-2017 pada rasio belanja daerah terlihat nilai terendah berada di Kabupaten Banyumas sebesar 120,031% yang artinya apabila belanja daerah

ditahun dasar 100% maka rata-rata belanja daerahnya 120,031% kondisi ini dikarenakan rasio belanja daerah jumlahnya paling kecil terutama pada belanja operasi dan belanja modal. Sedangkan nilai tertinggi berada di Kabupaten Banjarnegara sebesar 159,106% yang artinya apabila belanja daerah ditahun dasar 100% maka rata-rata belanja daerahnya 159,106% kondisi ini dikarenakan rasio belanja daerah jumlahnya paling besar terutama pada belanja operasi dan belanja modal.

Analisis untuk rata-rata indeks Kabupaten Eks Karesidenan Banyumas Tahun 2013-2017 pada rasio transfer terlihat nilai terendah berada di Kabupaten Cilacap sebesar 277,752% yang artinya apabila transfer ditahun dasar 100% maka rata-rata transfernya 277,752% kondisi ini dikarenakan rasio transfer jumlahnya paling kecil terutama pada belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kab/kota/pemdes. Sedangkan nilai tertinggi berada di Kabupaten Banjarnegara sebesar 758,555% yang artinya apabila transfer ditahun dasar 100% maka rata-rata transfernya 758,555% kondisi ini dikarenakan rasio transfer jumlahnya paling besar terutama pada belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kab/kota/pemdes.

Analisis untuk rata-rata indeks Kabupaten Eks Karesidenan Banyumas tahun 2013-2017 pada rasio surplus/defisit terlihat nilai terendah berada di Kabupaten Purbalingga sebesar -302,670% yang artinya apabila surplus/defisit ditahun dasar 100% maka rata-rata surplus/defisitnya -302,670% kondisi ini dikarenakan pendapatan daerah dikurangi dengan belanja daerah dan transfer hasilnya paling kecil. Sedangkan nilai tertinggi berada di Kabupaten Banyumas sebesar 152,067% yang artinya apabila surplus/defisit ditahun dasar 100% maka rata-rata surplus/defisitnya 152,067% kondisi ini dikarenakan pendapatan daerah dikurangi dengan belanja daerah dan transfer hasilnya paling besar

4. PENUTUP

4.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Analisis Rasio Keuangan Daerah Dalam Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Eks Karesidenan

Banyumas, maka dapat ditarik kesimpulan, Rasio Kemandirian Daerah menunjukkan bahwa Kabupaten Eks Karsidenan Banyumas tahun 2013 sampai tahun 2017 memiliki tingkat kemandirian daerah yang rendah sekali dan dengan pola hubungan instruktif, yaitu dimana Pemerintah Pusat memiliki peran yang dominan terhadap Pemerintah Daerah tersebut dalam pelaksanaan otonomi daerah.

Rasio Efektivitas menunjukkan bahwa Kabupaten Eks Karesidenan Madiun tahun 2013 sampai tahun 2017 memiliki tingkat efektivitas yang sangat efektif. Rasio Efisiensi menunjukkan bahwa Kabupaten Eks Karesidenan Banyumas tahun 2013 sampai tahun 2017 memiliki tingkat efisien yang cenderung efisien. Akan tetapi ada yang tidak efisien yaitu Kabupaten Banjarnegara tahun 2015.

Rasio Keserasian menunjukkan bahwa Kabupaten Eks Karesidenan Banyumas dalam menggunakan alokasi dana yang dimiliki lebih besar digunakan untuk belanja operasi dibandingkan untuk belanja modal.

Rasio Pertumbuhan menunjukkan bahwa Kabupaten Eks Karesidenan Banyumas mengalami pertumbuhan PAD, pendapatan, belanja operasi, dan belanja modal yang berbeda-beda. Namun Pertumbuhan PAD, pendapatan, belanja operasi, dan belanja modal Kabupaten Eks Karesidenan Banyumas tahun 2013 sampai tahun 2017 mengalami rata-rata pertumbuhan yang positif.

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah menunjukkan bahwa Kabupaten Eks Karesidenan Banyumas tahun 2013 sampai tahun 2017 memiliki tingkat kemandirian keuangan daerah pada tingkat rendah atau pola Instruktif. Untuk kesimpulan untuk semua rasio yang paling baik pada Kabupaten Banyumas, Karena Kabupaten Banyumas paling banyak mendapat nilai tertinggi pada keseluruhan rasio yang dilihat dari kriteria masing-masing rasio.

Analisis Commonsized untuk periode 2013-2017 untuk distribusi pendapatan daerahnya sudah cukup baik yang ditandai dengan tidak melebihi jumlah belanja. Namun terdapat satu perbedaan Untuk Kabupaten Banjarnegara jumlah belanja daerahnya melebihi pendapatan daerah. Untuk Analisis Indeks/Trend untuk periode 2013-2017 dari keseluruhan Kabupaten/Kota sudah

menunjukkan hal positif ditandai dengan jumlah pendapatan selama periode tersebut sudah melebihi dari jumlah pada tahun dasar.

4.2 Keterbatasan Penelitian

Beberapa hal yang menjadikan adanya keterbatasan dalam penelitian ini , (1) Penelitian ini hanya menggunakan empat rasio keuangan, yaitu rasio kemandirian daerah, rasio efektifitas, rasio keserasian, rasio pertumbuhan, dan rasio kemandirian keuangan daerah, (2) Penelitian ini menggunakan data laporan keuangan yang berasal dari Dirjen Perimbangan Keuangan, yangmana data tersebut bisa dikatakan kurang akurat/valid, (3) Dalam perhitungan target penerimaan pendaptan tidak dihitung berdasarkan potensi riilnya, (4) Penelitian ini hanya menggunakan populasi Kabupaten/Kota Eks Karesidenan Banyumas , dan (5) Penelitian ini hanya meneliti tahun 2013 hingga tahun 2017.

4.3 Saran

Adanya keterbatasan dari hasil penelitian ini, maka penulis memberikan saran kepada peneliti selanjutnya dapat menambahkan rasio keuangan yang digunakan dalam menilai kinerja keuangan Pemerintah Daerah, seperti rasio derajat kontribusi BUMD, rasio derajat desentralisasi fiskal dan rasio DSCR (Dept Service Coverage Ratio), sehingga ragam penelitian menjadi lebih luas. Peneliti selanjutnya juga dapat menggunakan data yang dari LHP LKPD yang berasal dari pemerintah Daerah. Selain itu, dalam penentuan target pendapatan dapat melihat potensi riilnya terlebih dahulu dan dapat menggunakan populasi yang berbeda dan lebih luas. Serta dapat menggunakan tahun anggaran yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

- Bisma, I. G dan Susanto, H. 2010.*Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2003-2007*. Ganec Swara Edisi Khusus Vol.4 No. 3
- Dharmawati, M. K dan Irmadariyani, R.2016.*Analisis Rasio Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dalam Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi*.Artikel Ilmiah Mahasiswa
- Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi 3. Salemba Empat. Jakarta.

- Halim, Abdul. 2010. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Salemba Empat
- Halim, Abdul. 2012. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat: Jakarta.
- Hanafi dan Halim. 2012. *Analisis Laporan Keuangan*. Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN. Yogyakarta.
- Hanik, Fitri Umi dan Karyanti, Tutik Dwi. 2014. *Analisis Rasio Keuangan Daerah Sebagai Penilaian Kinerja*. JABPI. Vol 22 No. 2. ISSN: 1411-6871
- Indra, Bastian. 2006. *Akuntansi Sektor Publik, Suatu Pengantar*. Jakarta. Erlangga.
- Ks, Lazyra. 2016. *Analisis Rasio Keuangan Daerah Dalam Menilai Kinerja keuangan Pemerintah Kota Medan*. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Kusumawati, Eny.Rina Trisnawati & Fatchan Achyani. 2018. *Analisis Laporan Keuangan (Tinjauan Kasus dan Riset Empiris)*. Muhammadiyah Univesrsity Press. Surakarta.
- Machmud, Masita, Kawung, George & Rompas, Wensy. 2014. *Analisis Kinerja Keuangan Daerah Di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2007-2012*. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi. Vol 14 No. 2: Manado. ISSN: 0853-6708
- Mahmudi. 2010. *Manajemen Keuangan Daerah*. PT. Erlangga: Jakarta
- Mahsun, Mohamad. 2013. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE.
- Mahsun. H. Andre. P. & Firman. S. 2013. *Akuntansi Sektor Publik*. Cetakan Keempat. Edisi Ketiga. Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2013. *Perpajakan: Edisi Revisi*. Andi: Yogyakarta.
- Oppier, Hermi. 2013. *Analisis Pengaruh Pelaksanaan Otonomi Daerah Terhadap Perkembangan kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara*. Jurnal Benchmark Vol. 2 November 2013.
- Pramita, Puput Risky. 2015. *Analisis Rasio Untuk Menilai Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Kebumen*. Skripsi Fakultas Ekonomi Iniversitas Negeri Yogyakarta
- Pramono, Joko. 2014. *Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Surakarta)*. Vol.7. No.13, Juli 2014.
- Prastowo dan Juliaty. 2008. *Analisis Laporan Keuangan*. Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN: Yogyakarta.
- Republik Indonesia. 1999. Undang-Undang Nomor 22 yang Kemudian menjadi UU. No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- Republik Indonesia. 2003. Undang-Undang Nomor 17 tentang Keuangan Negara: Jakarta.

- Republik Indonesia.2004. Undang-Undang Nomor 1 tentang Perbendaharaan Negara: Jakarta.
- Republik Indonesia.2004.Undang-Undang Nomor 15 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara: Jakarta.
- Republik Indonesia.2005. Undang-Undang Nomor 58 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah: Jakarta
- Republik Indonesia.2010. Undang-Undang Nomor 71 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan: Jakarta
- Ropa, Mega Oktavia. 2016. *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan*. Jurnal EMBA. Vol 4 No.2. ISSN:2303-1174.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Bisnis*.Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta
- Sutrisno. 2001. *Manajemen Keuangan: Teori Konsep dan Aplikasi Ekonisia Kampus Fakultas Ekonomi UII: Yogyakarta.*